



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Purbalingga (0281) 891235



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERNTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

---

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235

## KATA PENGANTAR

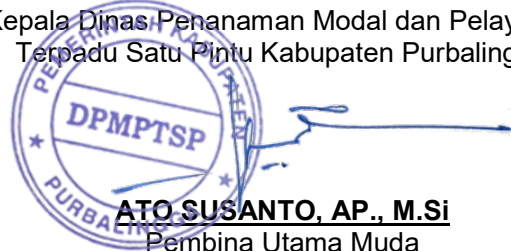
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dari Pengguna Anggaran / Perangkat Daerah kepada pihak pemberi amanah / wewenang yang didalamnya termuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 ini dapat dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada pemberi amanah / Bupati Purbalingga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



**ATO SUSANTO, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Purbalingga terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan kekuatan 35 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) orang Kepala Seksi, 12 (dua belas) orang JFU/Staf, 2 (dua) Pegawai Tidak Tetap dan 11 (sebelas) orang Tenaga Harian Lepas (THL)..

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya realisasi investasi baru; 2). Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi, Strategi yang dilaksanakan adalah : 1). Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD; 2). Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3). Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1). Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; 2). Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; 3). Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi; 4). Mendorong terjalinnya kemitraan investasi; 5). Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi; 6). Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi; 7). Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan; 8). Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; 9). Melaksanakan sosialisasi perizinan; 10). Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah;

11). Melaksanakan terobosan pelayanan (interlace, ilyess vicall, saklar lampu, sipurba, yasinta, limbasari jadi lapas); 12). Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line; 13). Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP; 14). Menyediakan layanan pengaduan yang memadai.

Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 tahun relatif kecil, hal ini terbukti bahwa secara umum kinerja penanaman modal dapat melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 758.271.424.434,- dari target Rp 670.000.000.000,- (113,17 % dari target atau naik 13,78 % dari realisasi tahun 2018) dan jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi mencapai realisasi sejumlah 2.794 unit dari target yang ditetapkan sejumlah 752 unit atau 371,54 %. semakin banyaknya jenis izin yang dapat dilayani.

Gambaran realisasi dan target kinerja sasaran DPMPTSP tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2020.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1.	Meningkatnya realisasi investasi		Realisasi nilai investasi baru	Rupiah	670.000	758.271	113,17
		Meningkatnya iklim investasi dan pelayanan perizinan	PMA dan PMDN yang beroperasi	Unit	752	2.794	371,54

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran kepada pemberi amanah.

## DAFTAR ISI

COVER.....	-
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
A. Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPSTSP 2018 .....	iii
B. Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja).....	1
D. Gambaran Umum SKPD .....	2
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis .....	8
1). Tujuan .....	8
2). Sasaran .....	9
3). Kebijakan .....	9
4). Program dan Kegiatan.....	10
B. Penetapan Kinerja 2018 .....	11
C. Tabel Anggaran.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	13
B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	21
BAB IV. PENUTUP .....	23
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan .....	23
B. Permasalahan Yang Dihadapi.....	23
C. Solusi .....	23
D. Strategi Pemecahan Masalah .....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A). Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Purbalingga, maka perlu disusun pertanggungjawaban antara pemberi amanah dan pelaksana amanah yang dituangkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana amanah yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B). Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan pelaporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keberhasilan atau tingkat pencapaian target indikator sasaran DPMPTSP tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan peran nyata dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

### **C). Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran (tahun anggaran 2020) dari penerima amanah kepada pemberi amanah dalam hal ini dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penerima amanah kepada Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (DPMPTSP) adalah:

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja terhadap keberhasilan target maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan;
- ✓ Sebagai bahan untuk menentukan perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- ✓ Sebagai bahan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

#### **D) Gambaran Umum DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

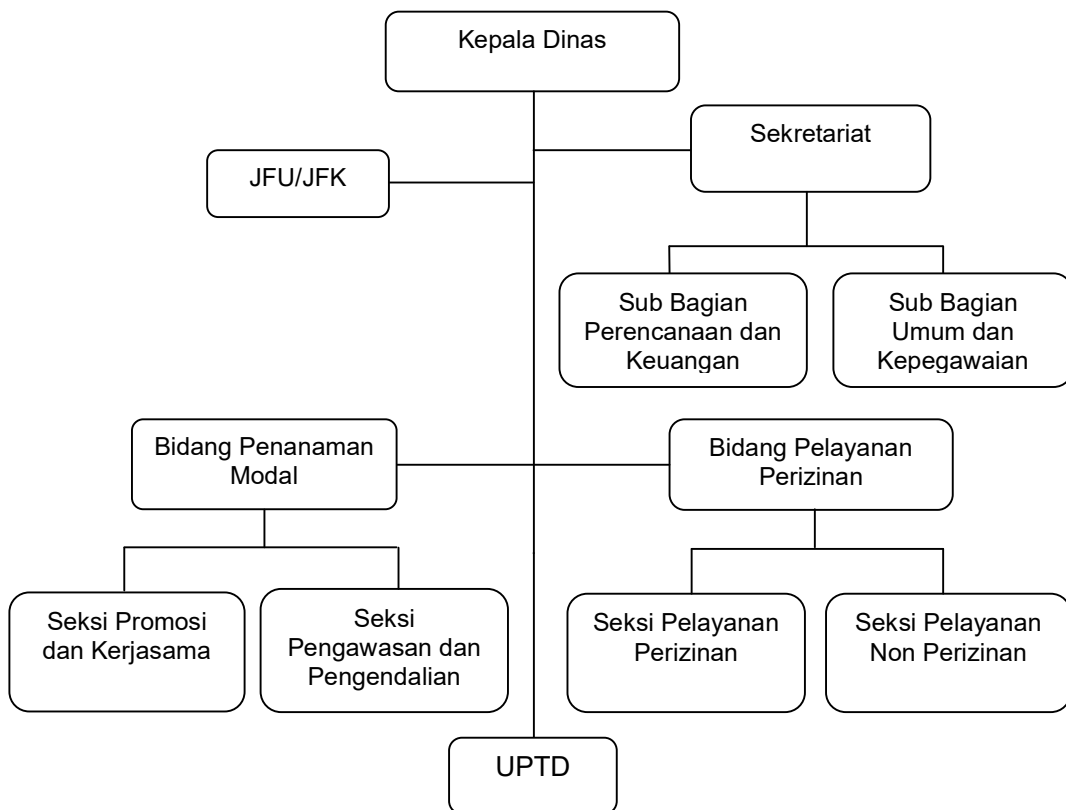
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;



4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanann Perizinan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Seksi Promosi dan Kerjasama;
8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
9. Seksi Pelayanan Perizinan;
10. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Jumlah pegawai sebanyak 35 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Menurut Golongan Ruang :

IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	PTT	THL	Jml
1	1	2	6	5	-	2	1	1	1	2	2	11	35

Menurut Jenis Kelamin

Laki – laki : 18 orang

Perempuan : 17 orang

Menurut jenjang pendidikan :

Pasca Sarjana	Sarjana	D 4	D 3	D 2	D 1	SLTA	SLTP	SD
1	19	-	7	-	-	7	1	-

Menurut jabatan:

- Jabatan struktural : 10 orang
- Jabatan fungsional umum : 12 orang
- Pegawai Tidak tetap : 2 orang
- Tenaga Harian Lepas (THL) : 11 orang

2. Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Gedung : 1 unit
2. Halaman : 2 (depan dan belakang)
3. Tempat parkir kendaraan : 2 (depan dan belakang)
4. Garasi kendaraan : 2 (di belakang)
5. Kendaraan roda empat : 5 unit (Toyota Inova 1 unit, Avanza 2 unit, Mitsubishi Kuda dan 1 unit keliling Gran max)
6. Kendaraan roda dua : 12 unit sepeda motor
7. Mebelair : sudah cukup
8. Komputer / PC : 30 unit
9. Laptop / Note bok : 11 unit

#### **E) Permasalahan Utama Yang Dihadapi**

- Peningkatan investasi / Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam mensejahterakan warganya, untuk itu masing – masing daerah akan berpacu untuk bisa meningkatkan / menarik investasi / investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten/kota.

Issue strategis yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur pendukung investasi (Bandara JB Soedirman, Jalan Tol Brebes – Semarang Exit Tol Pemalang). Hal ini merupakan faktor pendorong peningkatan investasi bagi Kabupaten Purbalingga apabila diikuti dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Purbalingga – Pemalang, peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan di Purbalingga;
2. Bergesernya investor besar padat karya dari Jabodetabek ke Jawa Tengah (garmen, alas kaki, elektronik, dll). Hal ini merupakan peluang pengembangan investasi di Kabupaten Purbalingga apabila Kabupaten Purbalingga dapat mempersiapkan diri berupa penyediaan lahan yang memadai untuk kebutuhan investasi, diikuti dengan upaya promosi serta kemudahan pelayanan perizinan berusaha;

3. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk investasi yang dinilai strategis dan memadai menjadi kendala yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu review Perda tentang RTRW diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk investasi minimal s/d 5 tahun mendatang;
4. Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang berada pada ranking ke 5 kabupaten kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, serta masih tingginya angka pengangguran khususnya tenaga kerja laki-laki, sehingga sangat dibutuhkan investasi yang padat karya (yang menyerap lebih banyak tenaga kerja laki-laki) di Kabupaten Purbalingga;
5. Kebijakan Pemerintah Pusat memberlakukan layanan perizinan usaha secara online terintegrasi secara nasional melalui *Online Single Submission (OSS)* melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online, merupakan terobosan kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha.

Menarik investor agar bisa berinvestasi di kabupaten / kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena para investor tentu akan membutuhkan berbagai macam fasilitas dan jaminan terhadap kelancaran investasinya. Keterbatasan lahan peruntukan pengembangan industri, perdagangan dan properti serta keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kemudahan dan kecepatan proses perizinan dengan dinamika perubahan aturan dari Pemerintah Pusat menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini SKPD terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan para investor.

- Sumber Daya Manusia

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat maka sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, hal

ini akan terus diupayakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pegawai dan peningkatan sistem pelayanan perizinan serta fasilitasi penanaman modal secara lebih aktif dan inovatif.

#### **F) Sistematika Penulisan**

Sistematika Laporan Kinerja DPMPSTP Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

##### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja)
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1). Tujuan
  - 2). Sasaran
  - 3). Kebijakan
  - 4). Program dan Kegiatan
- B. Penetapan Kinerja
  - Sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

##### **BAB IV. PENUTUP**

- E. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- F. Permasalahan Yang Dihadapi
- G. Solusi
- H. Strategi Pemecahan Masalah

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Startegis

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya indsutri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokasi serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

## **2. Sasaran.**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya realisasi nilai investasi ;
2. Meningkatnya pelaku usaha (PMA dan PMDN) yang beroperasi.

## **3. Kebijakan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, tantangan, yang dihadapi baik internal maupun eksternal serta peluang dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPSTSP menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
2. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
3. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
4. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi;
6. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
9. Melaksanakan sosialisasi perizinan
10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (interlace, ilyess vicall, saklar lampu, sipurba, yasinta, limbasari jadi lapas)
12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

#### 4. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan. Urusan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang termasuk dalam misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja.

Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu :

- a) Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi;
- b) Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

##### 1. *Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- b) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD

##### 2. *Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi*

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- 2) Business Gathering (Temu Usaha)
- 3) Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal
- 4) Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal



### 3. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah
- b) Akuisisi Arsip Perizinan
- c) Penguatan Pelayanan Perizinn (Sosialisasi Perizinan)

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Meningkatnya realisasi investasi		Reliasasi Nilai Investasi Baru	(Rp. Juta)	670.000
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan	PMA dan PMDN yang beroperasi	Unit	752

## C. Tabel Anggaran Tahun 2020

No	URAIAN	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>702.584.000,00</b>
	- Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	397.527.000,00
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	57.283.000,00
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	110.674.000,00
	- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	124.000.000,00
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai	3.100.000,00
	- Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	10.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi</b>	<b>112.583.000,00</b>
	- Promosi dan pemasaran potensi daerah	50.495.000,00
	- Business gathering (temu usaha)	5.000.000,00
	- Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal	41.410.000,00
	- Pemantauan dan pengendalian penanaman modal	15.678.000,00

<b>3.</b>	<b>Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu</b>	<b>287.384.000,00</b>
	'- Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek retribusi perizinan dalam daerah	162.324.000,00
	'- Akuisisi arsip perizinan	11.808.000,00
	- Penguatan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi Perizinan)	113.252.000,00

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Capaian Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis, Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak, Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan mrenunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik dan langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk Meningkatkan Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan.

Realisasi Nilai Investasi Baru.

Perkembangan investasi berdasarkan kepatuhan dan perhatian pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan, kemudian telah diberikan kepada para investor melalui pelayanan dan informasi yang jelas, agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaporkan dengan baik dan tepat waktu.

Sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pemantaun, pembinaan maupun pengawasan sehingga kendala yang terjadi bisa terpantau dengan baik. Pebandingan target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Jumlah Realisasi Nilai Investasi Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan	Realisasi Nilai Investasi Baru	483.271	547.462	622.870	679.696	670.000	758.271
	PMA dan PMDN yang beroperasi	663	809	654	717	752	2794

Nilai Investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp.758.271.424.434,- Nilai tersebut sudah melampaui target yang ditentukan sebesar Rp.670.000.000.000,- Jika dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp.679.695.974.162,- realisasi tahun 2018 sebesar RP. 622.870.314.578,- realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 547.461.617.874,- dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 483.271.457.226,- Realisasi Nilai Investasi tersebut mengalami trend meningkat setiap tahunnya.

Adapun dua macam perusahaan yang berinvestasi di Purbaingga yaitu Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Investasi baru dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu pengembangan perusahaan dan perusahaan yang baru.

Perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 2.794 unit. Dari data tersebut, dibagi menjadi dua (2) yaitu PMA sebanyak 12 unit dan PMDN sebanyak 2.782 unit.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan pengembangan sebanyak 2.782 unit dengan nilai investasinya sebesar Rp. 739.279.883.851,-

Pengembangan perusahaan yang paling besar adalah disektor perdagangan dan reparasi sebanyak 1.078 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 311.069.845.342,-

Sedangkan sektor yang paling kecil adalah sektor industri barang dari kulit dan alas kaki dengan 1 unit perusahaan dan nilai investasinya sebesar Rp. 70.000.000,-

Tabel 3.2  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMDN dan Jumlah PMDN yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2020

No	Sektor / Sub Sektor	Jml Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman pangan dan perkebunan	78	8.492.496.812
2	Peternakan	48	11.839.476.508
3	Kehutanan	3	215.000.000
4	Perikanan	50	1.645.875.000
5	Pertambangan	5	1.965.000.000
6	Industri makanan	486	31.001.176.061
7	Industri tekstil	110	14.404.023.003
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	1	70.000.000
9	Industri kayu	45	144.625.915.958
10	Industri kertas dan percetakan	29	11.640.501.900
11	Industri Kimia dan farmasi	23	681.900.000
12	Industri karet dan plastic	4	3.324.000.000
13	Industri mineral non logam	4	674.500.000
14	Industri logam, mesin dan elektronik	17	1602.000.600
15	Industri instrumen kedokteran presisi optic dan jam	12	1.590.000.000
16	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	9	374.000.000
17	Industri lainnya	108	18.347.290.864
18	Listrik, gas dan air	9	3.369.747.801
19	Konstruksi	50	64.983.467.158
20	Perdagangan dan reparasi	1.078	311.069.845.342
21	Hotel dan restaurant	372	12.652.367.011
22	Transportasi gudang dan komunikasi	33	17.491.004.542
23	Perumahan kawasan industry dan perkantoran	8	23.703.980.000
24	Jasa lainnya	200	53.516.315.291
	JUMLAH	2.782	739.279.883.851

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 18.991.540.583,-, Nilai investasi tersebut berasal dari 12 (dua belas) unit perusahaan PMA yang melakukan pengembangan. Yaitu :

1. PT Royal Korindah
2. PT Milan Indonesia
3. PT Eye Rich
4. PT Hyup Sung Indonesia
5. PT Interwork Indonesia
6. PT Nina Venus Indonusa
7. PT Yejin Beauty Ornament
8. PT Sung Shim International
9. PT Milan Indonesia
10. PT Yejin Beauty
11. PT Sung Shim International
12. PT Interwork Indonesia

Nilai investasi yang terbesar adalah pada sektor industri lainnya sebanyak 11 unit dengan nilai Rp. 18.591.540.583,- PMA yang berkembang di Kabupaten Purbalingga paling banyak bergerak dibidang rambut dan bulu mata palsu.

Tabel 3.3  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan Jumlah Unit PMA yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2020

No	Sektor / Sub Sektor	Jml Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman pangan dan perkebunan	-	-
2	Peternakan	-	-
3	Kehutanan	-	-
4	Perikanan	-	-
5	Pertambangan	-	-
6	Industri makanan	-	-
7	Industri tekstil	-	-
8	Industri barang dari kulit dan alas kaki	-	-
9	Industri kayu	-	-
10	Industri kertas dan percetakan	-	-

11	Industri Kimia dan farmasi	1	400.000.000
12	Industri karet dan plastic	-	-
13	Industri mineral non logam	-	-
14	Industri logam, mesin dan elektronik	-	-
15	Industri instrumen kedokteran presisi optik dan jam	-	-
16	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-
17	Industri lainnya	11	18.591.540.583
18	Listrik, gas dan air	-	-
19	Konstruksi	-	-
20	Perdagangan dan reparasi	-	-
21	Hotel dan restaurant	-	-
22	Transportasi gudang dan komunikasi	-	-
23	Perumahan kawasan industri dan perkantoran	-	-
24	Jasa lainnya	-	-
	JUMLAH	12	18.991.540.583

Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- b. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
- c. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi;
- d. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi.

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *feasibility study* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi;
- c. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke depan antara lain :

1. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industri, perdagangan, jasa dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan tahapan penanaman modal bagi calon investor;
4. Menyiapkan bahan promosi investasi yang komprehensif dan *up to date*;
5. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan usaha;
6. Meningkatkan koordinasi dan mendorong agar setiap OPD disamping tugas pokok fungsinya juga dapat menjalankan tugas untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga;
7. Memelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menjaga iklim yang kondusif untuk investasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini dicapai melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
2. Business Gathering (Temu Usaha)
3. Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal
4. Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal



### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Diketahui bahwa alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.102.551.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.046.955.526,- capaian realisasi keuangan sebesar 94,96 % dan capaian indikator kinerja rata-rata telah tercapai 242,35 %.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien. Adapun analisa efisiensi tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4  
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Jumlah Realisasi Nilai Investasi dan PMA – PMDN Yang Beroperasi Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Realisasi Nilai Investasi Baru (Milyar Rupiah)	113,17	94,96	18,21
Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan	PMA dan PMDN yang Beroperasi (Unit)	371,54	94,96	276,58

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Realisasi Nilai Investasi cukup tinggi yaitu sebesar 113,17 %, dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang hanya sebesar Rp 94,96 % sehingga indikator ini masuk dalam kategori efisien dengan besaran 18,21 %.

Sedangkan capaian kinerja PMA dan PMDN juga mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 371,54 %, dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar Rp 94,96 % sehingga indikator ini juga masuk dalam kategori efisien dengan besaran 276,58 %.

Analisa Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga memiliki 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan Utama yang dilaksanakan pada Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian target Indikator Kinerjanya.

Penjabarannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5.  
Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	No	Program/ Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	<b>Realisasi Nilai Investasi Baru</b>	<b>670.000</b>	<b>758.271</b>	<b>113,17</b>		<b>Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi</b>	<b>112.583.000</b>	<b>111.206.565</b>	<b>98,78</b>
II	<b>PMA dan PMDN yang beroperasi</b>	<b>752</b>	<b>2.794</b>	<b>371,54</b>	1	Promosi dan pemasaran potensi daerah	50.495.000	49.746.565	98,52
					2	Busines Gathering (temu binis)	5.000.000	5.000.000	100,00
					3	Penyusunan profil investasi dan penanaman modal	41.400.000	41.400.000	100,00
					4	Pemantauan dan Pengendalian penanaman modal	15.678.000	15.050.000	95,99
						<b>Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu</b>	<b>287.384.000</b>	<b>264.215.300</b>	<b>91,94</b>
					1	Pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek	162.324.000	145.003.500	89,33

					retribusi perizinan dalam daerah			
				2	Akuisisi arsip perizinan	11.808.000	11.808.000	100,00
				3	Penguatan pelayanan perizinan (Sosialisasi perizinan)	113.252.000	107.403.800	94,84

## B. Realisasi Anggaran

### Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dicapai melalui pelaksanaan 3 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.102.551.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 1.046.955.526,- atau 94,96 %

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi, anggaran per program tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6  
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2020  
BELANJA LANGSUNG

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.102.551.000</b>	<b>1.046.955.526</b>	<b>94,96</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>702.584.000</b>	<b>671.533.661</b>	<b>95,98</b>
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	397.527.000	379.758.511	95,53
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	57.283.000	54.313.000	94,82
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	110.674.000	107.646.450	97,26
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	124.000.000	116.978.200	94,34

5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	3.100.000	3.050.000	98,39
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	9.787.500	97,88
<b>II</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PEMASARAN POTENSI DAN FASILITASI INVESTASI</b>	<b>112.583.000</b>	<b>111.206.565</b>	<b>98,78</b>
7	Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah	50.495.000	49.746.565	98,52
8	Business Gathering (Temu Bisnis)	5.000.000	5.000.000	100,00
9	Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal	41.410.000	41.410.000	100,00
10	Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal	15.678.000	15.050.000	95,99
1	2	3	4	5
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU</b>	<b>287.384.000</b>	<b>264.215.300</b>	<b>91,94</b>
11	Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan Dalam Daerah	162.324.000	145.003.500	89,33
12	Akuisisi Arsip Perizinan	11.808.000	11.808.000	100,00
13	Penguatan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi Peizinan)	113.252.000	107.403.800	94,84

## BAB IV PENUTUP

### a. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Tahun Anggaran 2020, DPMPPTSP Kabupaten Purbalingga telah memperoleh capaian nilai kinerja yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terbukti bahwa indikator kinerja utama meningkatnya realisasi investasi baru melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 758.271.424.434,- dari target Rp. 670.000.000.000,- atau terealisasi 113,17% dan indikator kinerja utama PMA dan PMDN yang beroperasi dapat terealisasi sejumlah 2.794 unit dari jumlah target yang ditentukan sejumlah 752 unit atau terealisasi 371,54%.

### b. Permasalahan Yang Dihadapi

Namun demikian, di masa yang akan datang, masih diperlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukannya investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum semua Organisasi Perangkat teknis terkait memahami dan melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di Pusat sebagai pedoman pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik;
- c. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- d. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks.
- e. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk feasibility study dari masing-masing OPD atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

### c. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, DPMPPTSP telah menempuh langkah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut

dengan mendukung dan membantu percepatan review RTRW yang dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi, bersama-sama dengan dinas / instansi teknis terkait dan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten agar memahami dan melaksanakan NSPK dari kementerian / lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha melalui OSS, senantiasa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pelayanan perizinan, serta mendorong agar masing masing sektor membuat kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi.

d. Strategi Pemecahan Masalah

Berbagai upaya akan tetap dilaksanakan agar kegiatan dan peran DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dengan strategi Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi;
- b. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;
- c. Mendorong OPD teknis terkait untuk melaksanakan NSPK dari masing-masing kementerian/lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha secara terintegrasi secara elektronik
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi antara OPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;
- e. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi serta meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;

g. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :

- Melaksanakan deregulasi bidang perizinan daerah;
- Meningkatkan efektifitas dan kehandalan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik dengan penambahan sarana prasarana pelayanan, penyiapan petugas khusus pendampingan OSS dan penyediaan jaringan internet yang memadai.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Pelaporan;
2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun Pelaporan Yang Telah Ditandatangani

Purbalingga, Januari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



**ATO SUSANTO, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740706 199311 1 001